

Mobilisasi Sumber Daya oleh Greenpace Indonesia pada Global Climate Strike 2023

Chris Adi Nugraha¹

¹ Program Studi Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

chrisadinugraha@gmail.com

Untuk mengutip artikel ini:

Nugraha, Chris Adi. (2024). Mobilisasi Sumber Daya oleh Greenpace Indonesia pada Global Climate Strike 2023. *Jurnal Atma Sosiologika*, Vol. 1 (1), 33-58.

ABSTRAK

Semakin buruknya kondisi iklim di dunia membawa dampak yang buruk bagi keberlangsungan makhluk hidup di berbagai negara. Di Indonesia, aksi keadilan iklim untuk mendesak pemerintah agar merumuskan kebijakan menangani krisis iklim telah dilakukan, salah satunya oleh Greenpeace Indonesia. Hal ini mendorong peneliti untuk melihat bagaimana Greenpeace Indonesia memobilisasi sumber daya dalam aksi Global Climate Strike 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada teknik analisis data, penulis menggunakan konsep Mobilisasi Sumber daya dan Organisasi Gerakan Sosial Profesional. Hasilnya menunjukkan bahwa 1) Greenpeace Indonesia memobilisasi sumber daya moral melalui melibatkan musisi lokal untuk menyebarkan pesan 2) Pada mobilisasi sumber daya kultural Greenpeace Indonesia melakukan konsolidasi sebelum aksi. 3) Pada mobilisasi sumber daya organisasi Greenpeace Indonesia tergabung Koalisi Jeda Iklim dalam mengelola aksi. 4) Dalam memobilisasi sumber daya manusia Greenpeace Indonesia menerapkan journey bagi volunteer dan menerapkan nilai nirkekerasan dalam aksi. 5) Greenpeace Indonesia mengalokasikan dana hasil fundraising untuk dana operasional. Akses dalam mendapatkan dan menggunakan sumber daya mampu dilihat pada kelima sumber daya tersebut dengan mekanisme agregasi dalam mengumpulkan sumber daya, produksi diri dalam menambah nilai pada sumber daya, dan juga perlindungan dalam menjamin sumber daya keberlanjutan.

Kata Kunci: Global Climate Strike 2023; Greenpeace Indonesia; Mobilisasi Sumber Daya; Organisasi Gerakan Sosial Profesional.

ABSTRACT

The degrading global climate condition has brought negative impact on livelihoods in all countries. In Indonesia, climate justice action urging the government as a policy maker to

deal with the climate crisis has been carried out, one of which by Greenpeace Indonesia. This encouraged the researcher to look at how Greenpeace Indonesia mobilizes resources in the Global Climate Strike 2023 action. This research uses descriptive qualitative data collection methods such as observation, interview, and documentation. In the data analysis, the author uses the concepts of Resource Mobilization and Professional Social Movement Organization. The results show that 1) Greenpeace Indonesia mobilizes moral resources by involving local musicians to spread the message. 2) In mobilizing cultural resources, Greenpeace Indonesia carries out consolidation before the action. 3) In mobilizing resources, the Greenpeace Indonesia organization joined the Climate Pause Coalition in managing the action. 4) In mobilizing human resources, Greenpeace Indonesia implements a journey for volunteers and applies the values of nonviolence in action. 5) Greenpeace Indonesia allocates fundraising funds for operational funds. Access to obtaining and using resources can be seen in these five resources with aggregation mechanisms in collecting resources, self-production in adding value to resources, and protection in ensuring resource sustainability.

Keywords: Global Climate Strike 2023; Greenpeace Indonesia; Professional Social Movement Organization; Resources Mobilization.

LATAR BELAKANG

Fenomena perubahan iklim yang terjadi di berbagai negara membawa persoalan yang cukup serius bagi sebuah negara, hal ini karena perubahan iklim memiliki dampak buruk pada aspek kehidupan fisik, lingkungan, dan sosial-ekonomi dalam sebuah negara. Perubahan iklim serta dampak buruk yang tersebut mampu merugikan berbagai sektor seperti sektor pertanian, makanan, air, sosial, ekonomi, dan sistem ekologi. Sebagai sebuah negara, Indonesia dinilai memiliki catatan buruk sebagai aktor global dalam menyumbang perubahan iklim terus terjadi. Salah satu buktinya adalah Indonesia merupakan negara sebagai produsen gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia dengan 60 sampai 85% emisinya berasal dari kerusakan dan degradasi hutan (Eko, 2022). Hal ini diketahui melalui hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2021) mengenai Coastal Vulnerability Index yang menyatakan bahwa nilai potensial ekonomi rentang tahun 2020-2024 yang hilang karena perubahan iklim dari sektor pesisir dan laut mencapai Rp.81,53 Triliun terutama pada pesisir pulau Jawa dan Sulawesi. Tanggung jawab pemerintah dinilai belum cukup berdampak baik bagi perubahan iklim di Indonesia. Salah satu kebijakan tersebut yaitu dibuktikan dengan telah disahkannya undang-undang Cipta Kerja pada tahun 2023 yang di mana terdapat perubahan proses perizinan investasi berbasis lahan terkait bisnis ekstraktif pada sektor sumber daya alam

diganti dengan persetujuan lingkungan yang dinilai lebih ‘lemah’ dari perizinan usaha dan mampu memperburuk perubahan iklim di Indonesia. Selain itu hal ini dapat menimbulkan konflik baru seperti budaya oligarki, hilangnya hak rakyat (masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan), hingga mencederai proses demokrasi di Indonesia (Greenpeace Indonesia, Siaran Pers, 2021). Hal ini juga dibuktikan bahwa di Indonesia sendiri sejak 15 Maret 2019 hingga 26 Maret 2021 terdapat 116 aksi protes krisis iklim di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia seperti Bandung, Yogyakarta, Bali, Medan, Makassar, dan Jayapura (Apresian, 2021). Pada tahun 2023, di Indonesia terdapat aksi keadilan iklim Global Climate Strike yang diketahui diikuti oleh lebih dari 69 komunitas dari berbagai kota di Indonesia dengan tuntutan kepada pemerintah untuk memprioritaskan krisis iklim di tahun kampanye politik 2023-2024 (Walhi, 2023). Pada aksi Global Climate Strike Indonesia, para partisipan menuntut kepada pemerintah mengenai perlunya sebuah kebijakan publik yang berpihak sepenuhnya pada lingkungan hidup untuk memperbaiki krisis iklim yang sedang terjadi di Indonesia. Selain itu pada Global Climate Strike yang menjadi agenda tahunan, hal tersebut memiliki momentum khusus dalam mencapai tujuan yaitu keadilan untuk krisis iklim di Indonesia. Lebih dari itu, berbagai aksi keadilan iklim di Indonesia dinilai memiliki tingkat partisipasi yang rendah dan masih sulit untuk mempengaruhi kebijakan public (Apresian, 2021). Data lainnya menunjukkan bahwa orang Indonesia menjadi urutan pertama di dunia yang tidak percaya global warming dengan penekanan bahwa perubahan iklim tidak terjadi, atau perubahan iklim terjadi namun bukan manusia yang harus bertanggung jawab (Kamaliah, 2022).

Selain itu pada ditunjukkan melalui riset kuantitatif oleh Copsey, Dalimunthe, Hoihtink, dan Stoll (2013) terhadap 2.087 responden di Indonesia (Pulau Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sumatera, dan Kalimantan) mengenai pemahaman masyarakat tentang perkembangan isu lingkungan di Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat responden dalam berpartisipasi aksi perlindungan lingkungan yang di mana “sebanyak 53% responden menyatakan kurangnya waktu luang dalam mengikuti aksi, 49% responden menyatakan bahwa kurangnya uang dalam modal partisipasi gerakan, 48% responden menyatakan kurangnya pengetahuan yang memadai untuk mengikuti aksi, 46% responden menyatakan bahwa pengaruh lingkungan sekitar menjadi faktor penghambat, 42% responden menyatakan bahwa pesimis bahwa aksi yang akan dilakukan berdampak untuk perlindungan lingkungan, 39% responden menyatakan bahwa aksi perlindungan lingkungan memiliki risiko tinggi, dan 37% responden menyatakan bahwa tidak tertarik dengan

perlindungan lingkungan”. Melalui fenomena tersebut, Greenpeace Indonesia sebagai organisasi gerakan sosial profesional memiliki strategi dalam merancang kampanye setiap tahunnya pada Global Climate Strike di Indonesia sejak 2019. Greenpeace Indonesia sendiri merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan skala internasional dibawah Greenpeace Southeast Asia dan Greenpeace International. Berdiri sejak 2005, secara hukum Greenpeace Indonesia sudah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Greenpeace Indonesia sendiri memiliki visi menjamin kemampuan bumi untuk melestarikan keanekaragaman makhluk hidup yang tersisa di muka bumi dengan misi melindungi hak-hak dari lingkungan hidup di Indonesia, mengekspos dan berupaya menghentikan kejahatan lingkungan yang terjadi, dan juga pasca-kejadian di Indonesia, mengedepankan pembangunan bersih bagi makhluk hidup yang ada di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan, terdapat hal menarik yang menjadi konteks pada penelitian ini yaitu bagaimana Greenpeace Indonesia sebagai sebuah Organisasi Gerakan Sosial atau social movement organization dapat melakukan mobilisasi sumber daya pada masyarakat mengenai permasalahan krisis iklim di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Greenpeace Indonesia memobilisasi sumber daya dalam aksi Global Climate Strike 2023 di Indonesia? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Greenpeace Indonesia memobilisasi sumber daya dalam aksi Global Climate Strike 2023 di Indonesia.

KERANGKA KONSEP/TEORI

Organisasi Gerakan Sosial

Pada konteks gerakan sosial, secara sederhana Organisasi Gerakan Sosial merupakan sebuah organisasi dengan sifat kompleks dan formal yang mengidentifikasi tujuannya dengan preferensi gerakan sosial atau gerakan balasan serta mengupayakan untuk mengimplementasikan tujuan yang direncanakan (kontra gerakan sosial) (McCarthy dan Zald dalam Sukmana, 2016:175). Organisasi Gerakan Sosial memiliki perbedaan dari partai politik maupun kelompok kepentingan lainnya karena sumber utama kekuasaan dan legitimasi dari organisasi gerakan sosial berupa kapasitas mobilisasi protes sebagai lawan dari suara dominan dan pengaruh masing-masing individu (Rucht dalam Porta & Diani, 2006:140).

Berdasarkan isu dan dilema yang ada pada masyarakat, terdapat juga beberapa jenis organisasi gerakan sosial yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Organisasi Gerakan Partisipatif

a. Organisasi Protes Massa

Model ini menggabungkan perhatian pada demokrasi partisipatif dengan tingkat formal tertentu dari struktur organisasi (Porta & Diani, 2006:147). Dalam identifikasi organisasi model protes massa ini, hal ini cenderung ditemukan pada peran oligarki yang dapat ditemukan dalam segala jenis organisasi dan struktur institusi, selain itu juga dapat ditemukan dengan masalah yang terkait seperti model demokrasi organisasi partisipatif yang dicerai (Porta & Diani, 2006:147).

b. Organisasi Akar Rumput

Berbeda dengan model protes massa, model akar rumput menggabungkan orientasi partisipatif yang kuat dengan tingkat penataan formal yang rendah. Keberadaan organisasi semacam ini tergantung pada kesediaan anggotanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan mereka. Partisipasi semacam itu dapat didorong melalui kombinasi insentif ideologis dan solidaristik yang berbeda. Hal ini terkait dengan lokalitas (Porta & Diani, 2006:149). Mereka beroperasi sebagai "struktur intermiten" yaitu, "organisasi atau unit organisasi yang dikerahkan dan kemudian "dilipat" sampai periode aktivitas mereka tiba lagi" (Etzioni dalam Porta & Diani, 2006: 149).

2. Organisasi Gerakan Profesional

Adapun karakteristik yang identik dengan organisasi gerakan sosial profesional, di antaranya seperti kepemimpinan organisasi yang mencurahkan waktu penuh untuk sebuah gerakan sosial yang di mana organisasi tersebut juga merasa mewakili aktor tertindas pada sebuah gerakan sosial, serta sebagian besar sumber dayanya berasal dari luar organisasi tersebut; (2) memiliki keanggotaan yang cukup kecil atau tidak permanen; (3) terdapat upaya untuk menunjukkan citra "berbicara untuk konstituen"; (4) memiliki upaya untuk mempengaruhi kebijakan terhadap konstituen yang sama; (5) Posisi staf profesional sangat berperan penting dalam isu yang diambil organisasi atas masalah terkait (McCarthy & Zald dalam Porta & Diani, 2006: 145). Jenis organisasi ini

pun menampilkan banyak sifat organisasi profesional yang di mana partisipasi kerap didorong untuk menjadi sukarelawan untuk berkontribusi dalam proyek tertentu (Kolb dalam Porta & Diani, 2006: 145). Agenda pada organisasi gerakan sosial ini dapat mempromosikan tantangan dan pembangkangan radikal, dan terlibat dalam berbagai bentuk aktivisme perwakilan atas nama keanggotaan pasif yang membayar biaya (Diani dan Donati dalam Porta & Diani, 2006: 145). Merujuk pada kedua tipe organisasi gerakan sosial menurut Porta dan Diani tahun 2006 dan observasi yang dilakukan oleh peneliti selama internship di Greenpeace Indonesia pada bulan Oktober 2022 hingga Maret 2023, Greenpeace Indonesia identik dengan organisasi gerakan profesional. Hal ini berkaitan dengan konsep yang digunakan pada penelitian ini yaitu organisasi gerakan sosial profesional.

Mobilisasi Sumber Daya

Pada konteks gerakan sosial, mobilisasi sumber daya atau Resource Mobilization Theory (RMT) memiliki sebuah pengertian utama yaitu sebuah upaya untuk mencari basis rasionalitas tentang bentuk dan partisipasi dalam suatu gerakan sosial (Fireman dan Gamson dalam Sukmana, 172:2016). Basis rasionalitas dalam gerakan sosial tersebut mencakup beberapa konsep reward (imbalan) dan cost (biaya) yang mencakup seperti waktu, uang, keamanan personal, dan kehilangan pekerjaan (Sukmana, 173:2016). Artinya bahwa terdapat beberapa pendekatan mobilisasi sumber daya yang perlu dilakukan oleh sebuah organisasi gerakan sosial agar proses dalam melakukan konsentrasi kontribusi berjalan ideal dan tujuan gerakan sosial tercapai. Hal ini dapat ditemui dalam bentuk persyaratan fisik maupun lingkungan yang di mana hal tersebut juga mempengaruhi perkembangan dan perilaku sebuah gerakan (Pichardo dalam Sukmana, 2016:172). Konsep mobilisasi sumber daya merupakan unsur krusial dalam menekankan beberapa faktor seperti faktor struktural, ketersediaan sumber daya untuk individu dan kolektivitas yang terjalin di dalamnya serta menekankan unsur rasional mengenai partisipasi pada gerakan sosial (Klandermans dalam Sukmana, 2016:172). Mengenai sumber daya yang dimaksud, setidaknya terdapat 5 (lima) bentuk sumber daya pada konteks gerakan sosial menurut Edwards dan McCarthy (dalam Sukmana, 2016:185) yaitu:

1. Sumber daya moral, dalam hal ini secara sederhana dinilai bahwa meliputi legitimasi atau hak kekuasaan, dukungan solidaritas, dukungan simpati, dan dukungan dari

tokoh masyarakat yang dilegitimasi dengan cara teoritis yaitu mendapatkan banyak perhatian. Sumber daya ini cenderung berasal dari luar aktor gerakan sosial. Kategori dari sumber daya ini mampu dilihat melalui upaya gerakan sosial dalam mengumpulkan publikasi dari individu hingga organisasi yang mendukung tujuan aksi gerakan sosial.

2. Sumber daya kultural, dalam hal ini meliputi berbagai pengetahuan, produk budaya, atau pengalaman yang telah dikenal secara lebih luas walau tidak bersifat umum seperti merancang konsep protes akan sebuah isu, mengadakan konferensi pers, mengatur rapat atau pertemuan, membentuk sebuah organisasi. Hal ini dinilai penting karena kompetensi atau pengetahuan khusus mampu menjadi nilai bagi sebuah gerakan sosial. Kategori dalam sumber daya ini meliputi produk kultural seperti musik, literatur, film, dan video.
3. Sumber daya organisasi sosial, dalam hal ini meliputi pembentukan organisasi sosial yang disengaja atau organisasi sosial sepadan. Organisasi sosial yang disengaja merupakan organisasi yang dibentuk dengan motif khusus agar gerakan sosial dapat akses lebih lanjut, sedangkan organisasi sepadan dibentuk tidak untuk tujuan gerakan sosial namun aktor pada gerakan sangat memungkinkan mendapatkan akses dari organisasi ini. Bentuk pada sumber daya ini meliputi juga infrastruktur, jaringan sosial, dan organisasi yang dapat dikendalikan lebih jauh untuk mencapai tujuan gerakan sosial.
4. Sumber daya manusia, dalam hal ini sumber daya manusia memiliki sifat tangible atau nyata yang meliputi tenaga kerja, pengalaman, keterampilan, dan keahlian seperti kepemimpinan. Organisasi gerakan sosial dapat mengumpulkan dan menyebarkan anggotanya dengan lebih efektif dibanding dengan sumber daya organisasi sosial. Tetapi, kapasitas partisipasi tersebut dibatasi dari faktor ruang, ekonomi, relasi sosial, kewajiban, dan komitmen moral.
5. Sumber daya material, dalam hal ini kategori sumber daya material mencakup beberapa hal nyata seperti modal fisik dan finansial seperti moneter, hak milik, ruang kantor, peralatan, dan perbekalan. Hal ini bersifat eksklusif karena kasus uang lebih fungsional daripada karakteristik sumber daya lainnya.

Adapun berbagai mekanisme yang digunakan dalam mengakses sumber daya di atas yang mencakup beberapa hal menurut Edwards dan McCarthy (dalam Sukmana, 2016:188) yaitu:

1. Agregasi atau pengumpulan, hal ini merupakan sebuah cara untuk melakukan konversi yang sebelumnya sumber daya menyebar pada tiap individu, lalu dikonversi menjadi sistem kolektif oleh aktor gerakan
2. Produksi diri, pada mekanisme ini memiliki artian bahwa organisasi gerakan sosial menciptakan sumber daya atau menambah nilai pada sumber daya yang telah dikumpulkan. kategori yang mampu dilihat pada mekanisme ini beberapa di antaranya seperti membentuk koalisi, membangun jaringan, mendirikan organisasi gerakan sosial, dan lain lain.
3. Kooptasi atau pengambilan, hal ini memiliki acuan yaitu penggunaan sumber daya yang telah dikumpulkan secara transparan dan sesuai dengan izin kelompok.
4. Perlindungan, hal ini memiliki artian bahwa organisasi gerakan sosial mendapatkan penganugerahan berupa sumber daya dari individu atau organisasi. Bentuk umum yang dapat ditemui pada hal ini seperti penyediaan sumber daya manusia untuk beberapa waktu tertentu, donasi dari pihak swasta, hibah yayasan, dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Dalam jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang berawal melalui sebuah asumsi hingga pendekatan teoritis pada sebuah permasalahan riset yang di mana melibatkan individu hingga kelompok, sehingga hal tersebut dapat berguna untuk menjawab permasalahan yang bersifat sosial (Creswell, 2014). Tujuan dari penelitian ini memiliki beberapa hal, di antaranya seperti untuk memahami sebuah masalah secara mendalam dan lengkap (Creswell, 2014:64). Pertimbangan peneliti dalam menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini mampu menjelaskan secara deskriptif subjek pada penelitian yaitu Greenpeace Indonesia dalam melakukan mobilisasi sumber daya pada aksi kampanye Global Climate Strike 2023.

Data yang perlu dikumpulkan terbagi menjadi beberapa bentuk data yaitu data primer dan sekunder. Bentuk data tersebut dinilai mampu dikumpulkan melalui wawancara terhadap 3 narasumber pada Public Engagement and Action unit Greenpeace Indonesia, observasi

selama 40 hari kerja di Greenpeace Indonesia selama masa internship, dan dokumentasi berupa kegiatan yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia mencakup Global Climate Strike 2023. Berdasarkan rancangan proses pengumpulan data di lapangan di atas, data diuraikan secara sistematis agar dapat disajikan kepada para pembaca. Proses dalam menguraikan data tersebut merupakan analisis data, di mana sebuah proses di mana peneliti melakukan pengaturan, melakukan sortir atas data, dan menghubungkan pola demi pola sehingga memperoleh temuan penelitian berdasarkan fokus yang sudah dirancang (Murdiyanto, 2020). Analisis tersebut diperoleh melalui hasil transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi mendukung lainnya. Adapun model yang digunakan dalam melakukan analisis data yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (verifikasi) (Miles dan Huberman dalam Murdiyanto, 2020).

TEMUAN

Dalam deskripsi temuan penelitian ini, terdapat beberapa upaya Greenpeace Indonesia dalam melakukan mobilisasi sumber daya pada Global Climate Strike 2023 sebagai berikut:

Menentukan *Resource* berdasarkan *Key Moment* Kampanye dan Tahapan *Engagement*

Diketahui bahwa Greenpeace Indonesia terutama Public Engagement and Action unit memiliki acuan dalam merancang sebuah kampanye, yaitu momen penting atau *key moment*. *Key moment* sendiri merupakan sebuah kondisi di mana kampanye memiliki fokus pada suatu kejadian penting yang bertujuan untuk menjadi katalis dalam capaian kampanye dengan muatan isu dari kejadian tersebut. Hal tersebut juga mampu menjadi acuan bagi Greenpeace Indonesia dalam mengerahkan sumber daya manusia pada sebuah kampanye.

“... dan memastikan kalau misalnya di situ berarti resourcenya disiapkan, siapa yang bakalan kerja di situ, misalnya khususnya di Public Engagement siapa dan sebagainya. Jadi lebih ke arah priority, yang berarti memprioritaskan mana yang dapat dijalankan dalam konteks ini.” (Wawancara Danang Prasetyo, Public Engagement and Action Deputy Director, 1 September 2023)

Pernyataan Alin dalam menentukan *key moment* juga diperkuat oleh Danang Prasetyo yang kerap disebut Danang, beliau menyatakan bahwa peran direktur dan manajer dalam Greenpeace Indonesia umumnya lebih pada kerja harmonisasi. Artinya bahwa direktur dan manager PEA Greenpeace Indonesia menyikapi Global Climate Strike 2023 dengan melakukan koordinasi mengenai linimasa dan juga resource yang dikerahkan jauh sebelum

aksi berlangsung. *Key Moment* umumnya diterapkan juga oleh Greenpeace International, hal ini dapat ditemui pada modul *Creating Engaging Campaigns* yang ditulis oleh Engagement Support Team Greenpeace Internasional pada 11 Mei 2021. Pada modul dijelaskan bahwa dalam membuat engagement campaign perlu melakukan berbagai tahap seperti pemahaman audiens, peluang dalam melibatkan audiens, elemen dalam menyampaikan isu yang terangkum menjadi sebuah kampanye menarik dan memiliki substansi jelas. Jajaran direksi dan manager memiliki kapasitas dalam menentukan skala berdasarkan tahapan tersebut.

Menentukan Penanggungjawab Aksi berdasarkan Kapabilitas

Aksi Global Climate Strike 2023 di Indonesia tidak luput dari beberapa pihak penting yang terlibat langsung di Greenpeace Indonesia. Melalui berbagai pengalaman yang sudah dijalankan, beberapa pihak diketahui mendapatkan pengetahuan dan kemampuan untuk memaksimalkan aksi Global Climate Strike 2023 terutama oleh Greenpeace Indonesia. Sebagai sebuah organisasi kampanye yang terampil untuk menyikapi suatu isu, terdapat pihak yang cakap mengenai isu iklim dalam Public Engagement and Action Greenpeace Indonesia.

“Tapi karena memang secara struktur organisasi sudah ada posisi itu, ketika ada output strategis yang seperti GCS gitu ya kita melihat yang paling fit for purpose gitu ya untuk deliver di output yang GCS itu siapa. Dalam hal ini tentu saja temen temen Public Engagement dan temen temen Climate dan Energy tim gitu ya walaupun sebetulnya ada porsi juga temen temen di digital dan komunikasi karena memang ada kerja media dan sebagainya dengan porsi yang nggak terlalu besar. Salah satunya Alin. Alin salah satu penggugat di isu udara di Jakarta. Jadi dia memang secara personal ya ini masuk paket personality nya, di luar yang profesional” (Wawancara Danang Prasetyo, Public Engagement and Action Deputy Director, 1 September 2023)

Mas Danang mengatakan bahwa Public Engagement and Action memang bagian tetap dalam Greenpeace Indonesia, sehingga selain kampanye Global Climate Strike 2023 Public Engagement and Action cukup melakukan koordinasi dalam menyampaikan pesan yang sesuai dengan kapasitas campaigner yang ada. Salah satunya adalah Alin atau Khalisah Khalid yang di mana dikenal sebagai salah satu penggugat udara sehat di Jakarta. Pada aksi Global Climate Strike 2023 dijelaskan juga terdapat peran beberapa unit lain dalam Greenpeace Indonesia untuk membantu aksi.

Diketahui juga bahwa Alin menugaskan Ucha sebagai penanggung jawab Global Climate Strike 2023 dari Public Engagement and Action Greenpeace Indonesia.

“Awal itu kayaknya bulan Januari Alin mengirim undangan di grup PEA "ini ada rapat koalisi Jeda Iklim" aku tidak memiliki ekspektasi akan terjun sejauh ini gitu ya. Dan pada saat itu memang posisi campaigner yang in charge climate itu masih dicari dan belum ada. Ya udah silahkan aku dilibatkan. Nanti pokoknya kamu update ya setelah itu gitu.” (Wawancara Maftuchah Nugrahaini, Public Engagement Assistant, 11 Agustus 2023)

Kak Ucha juga bercerita bagaimana proses penugasan menjadi penanggung jawab dalam Global Climate Strike 2023 perwakilan dari Public Engagement and Action Greenpeace Indonesia. Dirinya menjelaskan bahwa Ucha ditugaskan secara langsung oleh Alin untuk terlibat secara langsung di lapangan, lalu diminta untuk memberikan perkembangan mengenai Global Climate Strike 2023 ke Alin.

Mengorganisir Konsolidasi sebelum Aksi

Digunakannya koalisi Jeda Iklim dalam mengorganisir Global Climate Strike 2023 di Indonesia juga memiliki tahapan dalam merespons isu yang relevan. Hal tersebut juga menjadi sebuah upaya koalisi Jeda Iklim karena Global Climate Strike 2023 di Indonesia terjadi serentak di berbagai kota. Strategi berkomunikasi tersebut memiliki output yang dapat digunakan untuk panduan aksi agar memaksimalkan aksi Global Climate Strike 2023.

“Jadi biasanya begini, kalau emang ada GCS gitu dan mau direspon bersama sama oleh koalisi, maka yang biasanya dilakukannya adalah pertama biasanya konsolidasi. Untuk apakah kita mau merespon secara bersama sama Climate Strike bisa dengan membentuk climate krisis dengan momentum GCS ini? Jika udah, biasanya kemudian akan merumuskan apa nih substansi yang mau kita bawa, apa ini pesan pesan yang mau kita bawa dan kemudian melihat apa aja yang dipunya masing masing organisasi seperti Greenpeace punya apa, punya riset apa, substansi masih dibawa dari situ.” (Wawancara Khalisah Khalid, Public Engagement and Action Manager, 24 Agustus 2023)

Mpok Alin menjelaskan bahwa tahapan pertama dalam berkoalisi Global Climate Strike 2023 adalah konsolidasi. Kegiatan konsolidasi berisikan pembahasan mengenai tujuan Global Climate Strike 2023, bentuk Global Climate Strike 2023 di Indonesia, Substansi dalam Global Climate Strike 2023 di Indonesia, pesan yang akan disampaikan pada Global Climate Strike 2023, hingga kemampuan dalam mengerahkan bentuk dukungan di Global Climate Strike 2023.

“Melalui group itu kita mencoba untuk ngadain lagi konsolidasi nasional dan mereka cerita masing masing daerah. Misalkan di Papua apa, di Aceh apa,

Kalimantan apa. Kita coba kemas dengan soft campaign dan hard campaign yang nantinya disampaikan. Tentunya karena dari konsolidasi itulah setidaknya kita mulai apa ya mencurahkan apa yang menjadi keresahan selama di GCS bulan Maret itu. Itu kita yang ada evaluasi lah, atau mungkin adain semacam brainstorming lagi lah” (Wawancara Maftuchah Nugrahaini, Public Engagement Assistant, 11 Agustus 2023)

Kak Ucha menjelaskan bahwa terdapat group yang mengatur konsolidasi lebih lanjut dengan berisikan berbagai peserta di daerah Indonesia seperti di Papua, di Aceh, hingga di Kalimantan. Keresahan tersebut kemudian dipikirkan lebih mendalam untuk bentuk aksi yang akan digunakan dalam Global Climate Strike 2023.

Mengalokasikan Hasil *Fundraising* untuk Operasionalisasi Aksi

Sebagai sebuah organisasi non-profit, Greenpeace Indonesia memaksimalkan kampanye menggunakan program donasi termasuk pada Global Climate Strike 2023 di Indonesia. Diketahui bahwa alokasi dana tersebut digunakan untuk kepentingan yang ada selama rangkaian Global Climate Strike 2023 di Indonesia berlangsung. Public Engagement and Action unit memiliki kapasitas dalam menentukan alokasi tersebut secara transparan. Hal tersebut diungkapkan oleh Alin mengenai dana operasionalisasi Global Climate Strike 2023.

“Tapi Greenpeace sendiri kan tentu saja ada alokasi sumber daya yang memang ada dari program. Kalau berapa banyak yang bisa dikeluarkan, tentu saja sesuai dengan skalanya gitu. Dan tentu saja kan ada skala prioritas ya. Kalau skalanya besar, tentu resources yang akan dikeluarkan juga besar gitu.” (Wawancara Khalisah Khalid, Public Engagement and Action Manager, 24 Agustus 2023)

Mpok Alin menjelaskan bahwa Greenpeace Indonesia memiliki program fundraising. Sehingga hal tersebut mampu menunjang berbagai kegiatan operasionalisasi kampanye yang ada, termasuk Global Climate Strike 2023 di Indonesia. Mengenai dengan jumlah yang dikeluarkan, Greenpeace Indonesia mempertimbangkan dengan cakupan kampanye yang ada dan juga aspek prioritas kampanye.

“Dan kita memang kalau di greenpeace kan sangat strict ya. Jadi kita memang tidak boleh. Menerima uang itu ya. Tapi apalagi dari partai politik, korporasi maupun Pemerintah itu. Jadi memang sangat dibatasi. Alokasinya juga tentu saja sangat tergantung dengan situasi. Misalnya kita apa mau membawa. Orang dari luar kota, kan mau nggak mau ya kita harus nyediain apa transportasinya gitu kan? Dan itu bagian dari cost. Kemudian dalam konteks GCS

tidak semuanya menggunakan kantong Greenpeace gitu dan saya pikir untuk GCS gitu ya hampir sejauh ini kan semuanya sebagai bareng dengan koalisi itu. dan kegiatannya juga memang. di beberapa organisasi memang ditetapkan sebagai prioritas gitu, organisasi dan juga menetapkan budget untuk GCS ini.” (Wawancara Danang Prasetyo, Public Engagement and Action Deputy Director, 1 September 2023)

Ketika ditanya bagaimana proses dalam melakukan alokasi anggaran di Greenpeace Indonesia untuk Global Climate Strike 2023, Danang menegaskan bahwa Greenpeace Indonesia memiliki sistem yang ketat untuk arus dana yang masuk. Greenpeace Indonesia tidak menerima anggaran dari pemerintah, partai politik, dan juga korporasi yang ada. Danang juga menjelaskan bahwa alokasi dana mengikuti dengan situasi yang ada berdasarkan hambatan dalam Global Climate Strike 2023. Greenpeace Indonesia juga tidak membiayai sepenuhnya dalam aksi, terlebih karena aksi Global Climate Strike 2023 di Indonesia merupakan kerja koalisi karena organisasi lain sudah menetapkan GCS 2023 sebagai prioritas.

Menggunakan Koalisi Jeda Iklim untuk Mengelola Aksi

Terlaksananya aksi Global Climate Strike 2023 merupakan karya dari berbagai pihak dalam merespon krisis iklim yang terjadi di Indonesia. Greenpeace Indonesia bersama dengan berbagai pihak yang memiliki fokus pada isu lingkungan diketahui mempunyai satu sikap. Diketahui bahwa sikap tersebut dituangkan dalam Aksi Global Climate Strike 2023 sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing organisasi. Greenpeace Indonesia sendiri menyikapi koalisi sebagai berikut:

“Jadi memang ada yang kita sebut sebagai koalisi yang sifatnya taktis gitu ya, yang ada sebaliknya sebagai strategis. Banyak dari temen temen yang di bareng bareng di GCS memang bagian dari koalisi atau organisasi yang sifatnya strategis, yang yang bukan cuman GCS doang, tapi ada kegiatan kegiatan yang lain juga yang memang kita dalam apa yang kita jajakan berhubungan dengan temen temen ini.nah kalau yang taktis kita bangun adalah kegiatannya. Jadi koalisi ada karena kegiatan.” (Wawancara Danang Prasetyo, Public Engagement and Action Deputy Director, 1 September 2023)

Mengenai jenis koalisi, Danang menilai bahwa Greenpeace Indonesia meyakini terdapat dua jenis koalisi yaitu koalisi taktis dan juga koalisi strategis. Kedua jenis tersebut dibedakan melalui tujuan awal dalam bergabung koalisi. Danang menjelaskan bahwa Koalisi Jeda Iklim masuk sebagai kategori koalisi strategis karena kegiatan terbentuk dari koalisinya, sehingga

koalisi tidak bubar apabila Global Climate Strike 2023 usai. Sementara koalisi taktis dijelaskan bahwa adanya koalisi karena kegiatan spesifik, potensi koalisi bubar memungkinkan karena hal ini hanya untuk menunjang 1 kegiatan khusus. Mengacu pada akun Instagram koalisi Jeda Iklim, Koalisi tersebut terbentuk pada tahun 2019 dengan postingan berupa poster Global Climate Strike 2019 dengan tema Indonesia Tenggelam Kalau Kita Diam. Koalisi Jeda Iklim juga diisi organisasi hingga komunitas yang bersifat dinamis, sejauh ini diketahui terdapat beberapa pihak seperti Greenpeace Indonesia, Enter Nusantara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Bumi Butuh Aksi, Extinction Rebellion Indonesia, Koprol Iklim, dan lain lain.

Memastikan *Volunteer* Mengikuti *Journey* sebelum Aksi

Peserta pada diketahui Global Climate Strike 2023 diikuti oleh berbagai pihak, termasuk Greenpeace Indonesia ikut membantu kampanye tersebut. Greenpeace Indonesia melalui Public Engagement and Action unit memiliki kapasitas dalam melakukan koordinasi relawan yang diterapkannya dalam berbagai kampanye. Aksi Global Climate Strike 2023 juga tidak mengetahui keberadaan relawan.

“Karena memang ujung tombak kita ada di relawan begitu. Kalau misalkan kita hanya mengandalkan staf, mereka terlalu banyak beban kerja dan akan lebih sulit memikul tanggung jawab begitu ya. Ya kalau sukarelawan memang bisa meluangkan waktu itu. Kadang juga misalkan kalau ada kesempatan, teman teman donatur juga kita undangan” (Wawancara Maftuchah Nugrahaini Public Engagement Assistant, 11 Agustus 2023)

Kak Ucha menyatakan bahwa keberadaan relawan menjadi ujung tombak dan berperan penting dalam menyukseskan aksi Global Climate Strike 2023 di Indonesia. Hal ini diungkapkan juga bahwa aksi Global Climate Strike 2023 tidak sepenuhnya bergantung pada juru kampanye Greenpeace Indonesia bahkan unit lain karena-masing unit sudah memiliki berbagai muatan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini juga diperkuat pada program sukarelawan dalam Greenpeace Indonesia dalam websitenya bahwa Greenpeace Indonesia memiliki akses dalam pendaftaran menjadi sukarelawan.

Greenpeace Indonesia yang di mana menjadi bagian dalam GPSEA (Greenpeace Southeast Asia) menjelaskan bahwa dalam bagaimana mereka memastikan relawan dapat terlibat secara berkelanjutan dengan 4 program yaitu Greenpeace Asia Tenggara memastikan bahwa relawan dapat meningkatkan kapasitas dengan mengadakan pelatihan materi kampanye

dan strategi isu, pelatihan aksi nirkekerasan sesuai dengan prinsip Greenpeace, difasilitasi untuk berkumpul bersama relawan yang dilayani oleh Greenpeace, dan relawan mampu menginisiasi kampanye Greenpeace sesuai dengan minatnya.

“Kalau di Greenpeace ya, kita menyebut perjalanan ya jadi kita kalau kita di dalam juga perjalanan. Jadi artinya orang yang tadinya tidak sadar, jadi sadar akan masalah, dan akhirnya sadar akan solusinya kan. sementara dia ikut aksi kan artinya dia merasa oke bergabung ke Climate Strike. Ini bagian dari saya untuk mencari solusinya agar apa saya tahu transisi energi dan lain sebagainya” (Wawancara Danang Prasetyo, Public Engagement and Action Deputy Director, 1 September 2023)

Pernyataan Alin juga diperkuat dengan jawaban Danang bahwa dirinya sebagai Public Engagement and Action Deputy Director meyakini bahwa terdapat 3 tingkat kesadaran pada audiens Greenpeace Indonesia dalam kampanye yang dijalankan yaitu tidak menyadari, sadar terhadap masalah, dan sadar terhadap solusi. Artinya Danang melihat bahwa perjalanan relawan dapat meningkatkan tingkat kesadaran relawan pada aksi Global Climate Strike 2023.

Melibatkan Masyarakat yang Terdampak Langsung Krisis Iklim dalam Aksi

Selama rangkaian Global Climate Strike 2023 berlangsung, terdapat beberapa isu lokal mengenai penyelamatan lahan yang sedang terjadi di Indonesia. Salah satu isu tersebut adalah konflik agraria di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur yaitu Desa Pakel. Berdasarkan modul kampanye Greenpeace International diketahui bahwa salah satu tahap membuat kampanye yang ideal yaitu peluang dalam melibatkan audiens. Greenpeace Indonesia lingkungan bersama-sama lainnya dalam aksi Global Climate Strike 2023 menerapkan tahapan tersebut dengan mengajak warga Pakel yang terdampak dan meminta keadilan hadir dalam Global Climate Strike 2023.

“Jadi mereka bisa diadvokasi sama WALHI, nah WALHI ini memang salah satu dari koneksi kita kan secara didukung dari Jeda Iklim ini. Nah akhirnya teman teman Walhi ajaklah teman teman Pakel untuk aksi dan kebetulan salah satu sukarelawan kita juga dari Pakel begitu dan memang vokal banget di aktivis Pakel itu. Makanya kita memberikan ruang untuk dia bersuara.” (Wawancara Maftuchah Nugrahaini, Asisten Public Engagement, 11 Agustus 2023)

Mengenai proses pelibatan warga Pakel yang terdampak, Ucha menjelaskan bahwa Greenpeace Indonesia mampu mengajak warga Pakel dalam membahas isu agraria dalam aksi Global Climate Strike 2023 melalui Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang

sedang melakukan advokasi dengan warga Pakel. Hal ini juga merupakan bagian dari jejaring karena Greenpeace Indonesia dan WALHI merupakan bagian dari Koalisi Jeda Iklim yang mengelola aksi Global Climate Strike 2023 sehingga dengan mudah mampu melibatkan warga Pakel. Selain itu, salah satu relawan Greenpeace Indonesia ada yang berasal dari Pakel, Banyuwangi sehingga mampu difasilitasi waktu dan tempat oleh Greenpeace Indonesia.

Memanfaatkan Momentum Pemilu 2024 dalam Membuat Tema Aksi

Sejak tahun 2019, aksi Global Climate Strike di Indonesia bertujuan untuk menyikapi komitmen pemerintah dalam mengurus isu-isu perubahan iklim. Selama persiapan tersebut pihak-pihak yang berpartisipasi dalam aksi mulai dari individu, komunitas, hingga organisasi berupaya maksimal dalam mengangkat tema Global Climate Strike yang relevan agar objektif dan juga menarik perhatian publik. Adapun aksi Global Climate Strike 2023 mengangkat tema “Pilih 1,5” yang mengarah pada Pemilihan Umum 2024 di Indonesia.

“Jadi kalau parpol kan biasanya jumlahnya ada satu, dua, tiga, empat, lima, dst. Di mana kita bikin yang namanya keadilan iklim 1,5. Jadi angka 1,5 ini mewakili suhu bumi dan kita ingin memastikan suhu bumi ini terjaga 1,5 derajat.” (Wawancara Maftuchah Nugrahaini, Asisten Public Engagement, 11 Agustus 2023)

Kak Ucha menyatakan bahwa tema 1,5 berdasarkan jumlah partai politik yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga dijelaskan bahwa ketika tahun 2024 akan diselenggarakan Pemilihan Umum, audiens diharapkan memilih individu atau partai politik yang berkomitmen dengan krisis iklim. Greenpeace Indonesia dan diatur Jeda Iklim meyakini bahwa momentum Pemilihan Umum dipilih untuk menyebarkanluaskan angka 1,5 karena ingin memastikan suhu bumi yang terjadi pada saat ini terjaga tidak lebih dari 1,5 derajat celcius sesuai dengan Perjanjian Paris tahun 2016.

“Dan saya pikir seluruh organisasi lingkungan juga adalah bagaimana kita menjaga atau memastikan suhu bumi terjaga 1,5 derajat, dalam konteks krisis ini menjadi fokus itu dan artinya tema itu yaitu menjadi bahwa Climate Strike menjadi salah satu prioritas organisasi untuk mengerjakannya.” (Wawancara Danang Prasetyo, Wakil Direktur Keterlibatan dan Aksi Publik, 1 September 2023)

Danang juga memperkuat gagasan Ucha bahwa seluruh organisasi lingkungan termasuk Greenpeace Indonesia memiliki gagasan yang serupa dalam angka 1,5 derajat celcius.

Sehingga hal tersebut mampu menjadi prioritas dalam melakukan aksi kampanye Global Climate Strike 2023 dengan mengacu pada Perjanjian Paris tahun 2015.

Melibatkan Musisi Dalam Menyebarluaskan Pesan Aksi

Aksi dalam Global Climate Strike 2023 di Indonesia diketahui memiliki pendekatan kampanye pesan yang mengarah pada generasi Z. Greenpeace Indonesia sendiri menilai bahwa dalam mendapatkan atensi generasi Z dan anak muda perlu menyampaikan pesan yang efektif agar pesan disebarkan secara luas dan dipahami dengan mudah.

“Kalau kenapa anak muda, ya paling tidak di pemilu nanti parpol ini tuh ada yang mengusung visi misinya tentang lingkungan. Paling tidak makanya generasi muda yang tahun ini yang nantinya akan menjadi pemilih itu paling banyak ya paling 50 persen kalau bisa lebih ya harapannya mereka juga paham dan mereka itu bisa memilih calon yang memang dia fokus ke keadilan iklim.” (Wawancara Maftuchah Nugrahaini, Asisten Public Engagement, 11 Agustus 2023)

Kak Ucha menjelaskan bahwa Greenpeace Indonesia terutama Public Engagement and Action memiliki hubungan dengan beberapa musisi yang ada di Indonesia, selain itu musisi yang dilibatkan merupakan musisi yang menciptakan lagu dengan unsur lingkungan dan juga isu sosial. Harapan Ucha mengenai keterlibatan tersebut adalah dengan menjelang Pemilihan Umum di Indonesia, anak muda yang pemilih dominan dibandingkan kaum lainnya mampu memilih calon legislatif dan eksekutif yang memiliki fokus kebijakan pada keadilan iklim di Indonesia. bahwa menurut survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) dan Unitrend pada 1.245 responden dari 13 provinsi tanggal 13 Maret sampai 15 April 2023 menunjukkan responden generasi Z yang di mana lahir di antara tahun 1997-2012 dan milenial yang lahir di antara tahun 1981-1996 dan memiliki rentang usia 15-34 tahun menyatakan krisis iklim hal nyata dan dirasakan, sementara itu 5% responden dengan usia 45-54 tahun memiliki persepsi bahwa krisis iklim tidak nyata. Hal tersebut menjelaskan bahwa generasi muda lebih peduli terkait kondisi bumi akibat krisis iklim yang semakin buruk. Selain itu, sebanyak 60% responden dengan mayoritas generasi Z dan milenial menyatakan bahwa pemerintah belum memiliki Upaya merumuskan kebijakan untuk mencegah krisis iklim di Indonesia seperti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 mengenai ekonomi karbon dalam Perjanjian Paris 2015. Oleh karena itu masyarakat khususnya generasi Z dan milenial milenial menanti gagasan para calon capres mengenai isu krisis iklim di Pemilihan

Umum sehingga mampu menjadi pertimbangan bagi generasi z dan milenial dalam memilih presiden dan wakil presiden tahun 2024.

“Jadi memang karena kan kan tadi ya. Sekali lagi sangat strategis. Kenapa ini menjadi kita angkat, karena target kita itu anak muda tentu Gen Z disini memang agak penasaran ya. Aku waktu terakhir menonton, kamu bisa melihat bagaimana popularitas festival musik ya acara acara musik, konten konten musik artinya yang festival musik dan suara terkait bagi temen temen ini. Jadi itu cara kita untuk masuk memasukkan pesan kita ke anak muda ini.” (Wawancara Danang Prasetyo, Deputy Direktur Keterlibatan dan Aksi Publik, 1 September 2023)

Mas Danang menjelaskan bahwa pendekatan tersebut sangat strategis melalui festival musik dan melibatkan musisi di dalamnya untuk menyampaikan pesan. Danang juga meyakinkan bahwa antusias anak muda dalam festival musik atau acara musik cukup tinggi. Greenpeace Indonesia melalui PEA berupaya melibatkan pesan kampanye tersebut kepada para musisi lokal yaitu Barasuara di Festival Pestapora.

Menerapkan Nilai dan Prinsip Nirkekerasan dalam Aksi

Aksi Global Climate Strike 2023 merupakan aksi nirkekerasan atau aksi damai. Greenpeace Indonesia bersama Jeda Iklim juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam mengikuti aksi Global Climate Strike 2023. Panduan dalam aksi Global Climate Strike 2023 di Indonesia juga direncanakan secara matang oleh para organisasi salah satunya adalah Greenpeace Indonesia yang wajib dalam melakukan aksi.

“Kita kan punya pedoman dan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan biasanya itu akan selalu kita sampaikan. Termasuk tadi ya soal komitmen itu terkait sama nilai nilai yang pasti. Tapi kalau nilai itu kan terkait sama nilai kita yang harus kita selalu gunakan. Tapi setidaknya pada saat kampanye tersebut berlangsung, ada panduan buat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan misalnya termasuk bawa tumblr gitu ya. Ya itu, dan tidak melakukan apa yang namanya tindakan yang kekerasan karena kita organisasi non kekerasan, makanya penting ada induksi penting yang adalah peserta yang sudah ikut induksi, tapi dalam aksinya pun ada panduan Anjuran dan Larangannya” (Wawancara Khalisah Khalid, Public Engagement and Action Manager, 24 Agustus 2023)

Mpok Alin menjelaskan bahwa dalam aksi Global Climate Strike 2023 terdapat himbauan mengenai tindakan yang perlu dan tidak perlu sebelum aksi berlangsung. Dirinya juga menegaskan bahwa terdapat nilai yang ada pada Greenpeace Indonesia yaitu aksi damai

tanpa kekerasan untuk semua kampanye yang dilakukan. Komitmen dalam mengikuti aksi juga diterapkan dalam Global Climate Strike 2023 yaitu untuk tidak menggunakan plastik minuman sekali pakai dan diusahakan membawa botol minum tidak sekali pakai. Cara menerapkan nilai dan prinsip tersebut Alin menjelaskan bahwa pentingnya ada induksi atau penyuluhan di Greenpeace Indonesia bagi sukarelawan dan penerapan himbauan yang ada pada aksi Global Climate Strike 2023 di Indonesia.

“Kita ingin mengadaptasi dari kerusakan Greenpeace Indonesia, JEDIS kebetulan tapi gak ada S nya. Kita ada keadilan, kesetaraan, keberagaman, dan inklusi. Ini banget ya sebenarnya bukan yang bikin jadi kemarin, tapi habis itu kan kita ada konsolidasi lagi dan menerapkan itu baru” (Wawancara Maftuchah Nugrahaini, Public Engagement Assistant, 11 Agustus 2023)

Nilai lain yang ada pada Global Climate Strike 2023 juga ditegaskan oleh Ucha bahwa Global Climate Strike 2023 mengusung nilai Justice, Equity, Diversity, dan Inclusion (JEDI). Nilai sebelumnya juga diterapkan pada Greenpeace Indonesia dalam bekerja. Namun Ucha menjelaskan bahwa terdapat modifikasi dalam nilai yang diterima pada Global Climate Strike 2023.

Ditemukan bahwa terdapat 4 nilai utama yang dijunjung oleh Koalisi Jeda Iklim yaitu Justice, Equity, Diversitu, dan Inclusion. Masing-masing dari nilai tersebut memiliki penjabaran bahwa terdapat keadilan dalam berdinamika dan pembagian tugas serta tanggung jawab dalam Global Climate Strike 2023, peserta Global Climate Strike 2023 memiliki hak yang sama dalam berkontribusi, seluruh masyarakat menghargai yang bergabung dalam aksi, dan menjadi ruang aman bagi semua orang yang ikut serta dalam aksi Global Climate Strike 2023. Adapun Prinsip yang dijunjung dalam aksi Global Climate Strike 2023 salah satunya adalah nirkekerasan yang memiliki artian bahwa aksi Global Climate Strike 2023 di Indonesia tidak membahayakan dan membuat penderitaan bagi seluruh pihak selama aksi berlangsung.

PEMBAHASAN

Dalam memahami mobilisasi pada sebuah gerakan sosial, terdapat unsur krusial yang mampu melihat sejauh mana gerakan termobilisasi sesuai dengan tujuan gerakan. Penekanan bahwa indikator keberhasilan gerakan sosial juga ditandai dengan terdapat dinamika organisasional seperti kepemimpinan yang baik, dan pengelolaan sumber daya (Pichardo dalam Sukmana, 2016:174). Pengelolaan akses sumber daya tersebut juga diketahui melalui 4 tahap yaitu agregasi, produksi diri, kooptasi, dan perlindungan (Edwards dan McCarthy dalam

Sukmana, 2016:188). Merujuk pada hal di atas, dapat dilihat bahwa bagaimana Greenpeace Indonesia sebagai aktor gerakan sosial memobilisasi sumber daya dan mengaksesnya dalam aksi Global Climate Strike 2023 sebagai berikut:

Sumber Daya Moral

Sumber daya moral, dalam hal ini secara sederhana dinilai bahwa meliputi legitimasi atau hak kekuasaan, dukungan solidaritas, dukungan simpati, dan dukungan dari tokoh masyarakat yang dilegitimasi dengan cara teoritis yaitu mendapatkan banyak perhatian (Sukmana, 2016: 185). Berdasarkan pemahaman tersebut, ditemukan bahwa Greenpeace Indonesia melibatkan musisi Indonesia dalam menyampaikan pesan aksi Global Climate Strike 2023 di Indonesia. Greenpeace Indonesia melakukan pendekatan terhadap generasi Z dalam menyadarkan bahwa krisis iklim terjadi di Indonesia melalui festival-festival musik yang sedang masif di Jakarta. Pendekatan tersebut diketahui sudah melewati kajian strategis yang dapat efektif dalam menyampaikan pesan dan juga mendapatkan atensi generasi Z. Hal ini diketahui bahwa Generasi Z memiliki andil dominan dalam Pemilihan Umum 2024. Cara Greenpeace Indonesia dalam meraih musisi tersebut juga dengan kapasitas Public Engagement and Action yang di mana memiliki koneksi dalam musisi yang ada di Indonesia. Terdapat pertimbangan juga dalam menentukan musisi terlibat yaitu bahwa konsen dari musisi terhadap isu sosial dan lingkungan melalui karya lagunya. Berdasarkan tahapan tersebut dapat dilihat bahwa Greenpeace Indonesia mengakses sumber daya moral dari agregasi. Agregasi artinya bahwa Greenpeace Indonesia melalui pesan musisi yang ditampilkan di festival musik mampu mengumpulkan pihak yang mendukung pesan Greenpeace Indonesia, sehingga potensi di mana individu terkonversi menjadi kolektif sangat memungkinkan terjadi.

Sumber Daya Kultural

Sumber daya ini meliputi berbagai pengetahuan, produk budaya, atau pengalaman yang telah dikenal secara lebih luas walau tidak bersifat umum seperti merancang konsep protes akan sebuah isu, mengadakan konferensi pers, mengatur rapat atau pertemuan, membentuk sebuah organisasi. Hal ini dinilai penting karena kompetensi atau pengetahuan khusus mampu menjadi nilai bagi sebuah gerakan sosial (Sukmana, 2016: 185). Berdasarkan pengertian tersebut, ditemukan bahwa Greenpeace Indonesia dalam Global Climate Strike 2023

mengorganisir konsolidasi sebelum aksi. Konsolidasi merupakan tahapan pertama dalam melakukan koordinasi untuk respons Global Climate Strike 2023. Koordinasi tersebut juga berisikan beberapa hal seperti diskusi substansi yang akan dibawa, konsep aksi dalam Global Climate Strike 2023, hingga teknis lapangan dalam Global Climate Strike 2023.

Sehubungan dengan skala Global Climate Strike 2023 di Indonesia merupakan skala nasional, terdapat beberapa perwakilan dari berbagai pihak di pulau yang ada di Indonesia seperti Papua, Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain. Perwakilan tersebut menyampaikan situasi dan kondisi dalam wilayah asal mereka, selain itu berdiskusi mengenai konsep aksi di kota masing-masing dengan substansi yang diangkat berupa tuntutan. Konsolidasi nasional tersebut juga dilakukan secara daring melalui channel komunikasi dan dilanjutkan dengan sesi diskusi luring. Hasil dari konsolidasi nasional tersebut juga dirangkum dalam dokumen yang akhirnya menjadi panduan bagi peserta. Panduan tersebut dipublikasikan melalui media sosial bersama dengan beberapa tuntutan dan dapat diakses oleh publik.

Berdasarkan temuan sumber daya tersebut, akses mobilisasi sumber daya dapat dikategorikan sebagai produksi diri. Artinya bahwa mekanisme ini memiliki artian bahwa organisasi gerakan sosial menciptakan sumber daya atau menambah nilai pada sumber daya yang telah dikumpulkan (Sukmana, 2016:188). Terjaringnya pihak yang tergabung dalam koalisi dengan menambahkan wawasan dan pengetahuan antar organisasi bahkan terhadap publik dapat menjadi sebuah sumber daya kultural yang diakses melalui produksi diri.

Sumber Daya Organisasi Sosial

Sumber daya Organisasi Sosial memiliki pemahaman bahwa hal ini meliputi pembentukan organisasi sosial yang disengaja atau organisasi sosial sepadan. Organisasi sosial yang disengaja merupakan organisasi yang dibentuk dengan motif khusus agar gerakan sosial dapat akses lebih lanjut (Sukmana, 2016: 185). Bentuk sumber daya organisasi sosial yang diupayakan oleh Greenpeace Indonesia dalam Global Climate Strike 2023 adalah dengan bergabung dengan koalisi Jeda Iklim. Koalisi jeda iklim sendiri terdiri dari berbagai pihak yang memiliki fokus pada pengembangan lingkungan hidup, termasuk Greenpeace Indonesia. Terlibatnya Greenpeace Indonesia bersama koalisi Jeda Iklim juga merupakan suatu bentuk menyatakan sikap bersama dalam merespon Global Climate Strike 2023. Tujuan dari pembentukan koalisi juga untuk membangun kegiatan Global Climate Strike 2023 agar pesan kampanye disampaikan secara maksimal.

Berdasarkan temuan tersebut, mekanisme yang ada pada sumber daya organisasi sosial oleh Greenpeace Indonesia dan koalisi Jeda Iklim mampu dinilai sebagai akses produksi diri. Hal tersebut juga serupa dengan akses sumber daya kultural karena melalui terkumpulnya sumber daya dari organisasi selain Greenpeace Indonesia mampu membawa sumber daya baru berupa jaringan dari masing-masing organisasi yang tidak terjaring dari Greenpeace Indonesia.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam konteks gerakan sosial memiliki sifat *tangible* atau nyata yang di antaranya meliputi tenaga kerja, pengalaman, keterampilan, dan keahlian dalam sebuah gerakan (Sukmana, 2016: 185). Greenpeace Indonesia dalam unsur sumber daya manusia pada aksi Global Climate Strike 2023 ditemukan bahwa adanya penerapan nilai dan prinsip dalam aksi. Greenpeace Indonesia menjamin keahlian tenaga kerja dengan Program Nonviolence Training yang di mana sesuai pada nilai dan prinsip Greenpeace Indonesia yaitu aksi tanpa kekerasan. Aksi nirkekerasan tersebut juga diartikan bahwa tidak ada pihak yang terancam dan disakiti selama aksi berlangsung. Selain itu prinsip yang ada pada aksi Global Climate Strike 2023 mengusung nilai *Justice, Equity, Diversity, dan Inclusion* (JEDI). Penjabaran nilai tersebut yaitu pada aksi Global Climate Strike 2023 terdapat keadilan dalam berdinamika dan pembagian tugas serta tanggung jawab, peserta Global Climate Strike 2023 memiliki hak yang sama dalam berkontribusi, menghargai seluruh masyarakat yang bergabung dalam aksi, dan menjadi ruang aman bagi semua orang yang tergabung. Adapun prinsip nirkekerasan diusung juga dalam aksi Global Climate Strike 2023.

Hal tersebut juga masuk dalam 4 kegiatan Journey Greenpeace Indonesia yang melibatkan volunteer Greenpeace Indonesia yaitu Capacity Building, Regular Activist Training, Volunteer Gathering, dan Volunteer led Activities. Oleh karena itu, Journey Greenpeace Indonesia dalam melibatkan volunteer yang merupakan ujung tombak Greenpeace Indonesia mampu memahami tingkat kesadaran isu yang maksimal dan meminimalisasi tingkat kesadaran *unaware*. Berdasarkan tersebut, mekanisme akses sumber daya yaitu produksi diri juga ditemukan karena Greenpeace Indonesia melakukan pelatihan pada sumber daya manusia pada aksi Global Climate Strike 2023 di Indonesia, sehingga terdapat nilai lebih dalam sumber daya manusia dari Greenpeace Indonesia terhadap peserta aksi Global Climate Strike 2023.

Sumber Daya Material

Sumber daya material pada konteks gerakan sosial dapat dikategorikan beberapa hal nyata seperti modal fisik dan finansial seperti moneter, hak milik, ruang kantor, peralatan, dan perbekalan (Sukmana, 2016:185). Berbagai unsur di atas yang diketahui dalam penelitian ini yaitu Greenpeace Indonesia mengalokasikan hasil fundraising untuk operasionalisasi aksi Global Climate Strike 2023. Diketahui juga bahwa operasionalisasi aksi seperti biaya properti, biaya transport, biaya konsumsi dialokasikan oleh Greenpeace Indonesia dari program fundraising. Alokasi dana operasionalisasi dipastikan oleh Greenpeace Indonesia setiap tahunnya karena Global Climate Strike 2023 menjadi prioritas kampanye. Namun dalam rincian spesifik biaya operasional, Greenpeace Indonesia mengikuti situasi yang ada di lapangan yang ada. Adapun properti yang digunakan dalam aksi Global Climate Strike 2023 dengan cara dekorasi secara mandiri tanpa melibatkan sponsor dari pihak lainnya.

Berdasarkan temuan dalam penggunaan alokasi dana operasionalisasi aksi Global Climate Strike 2023, hal ini mampu dikategorikan dalam akses sumber daya perlindungan. Arti mekanisme perlindungan memiliki artian bahwa organisasi gerakan sosial mendapatkan penganugerahan berupa sumber daya dari individu atau organisasi (Sukmana, 2016:188). Program penggalangan dana dari para donor memastikan bahwa Greenpeace Indonesia melindungi sikap independen dalam organisasi gerakan sosial profesional, sehingga hal tersebut jauh dari ancaman pihak yang meragukan independensi Greenpeace Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Greenpeace Indonesia memobilisasi sumber daya dalam aksi Global Climate Strike 2023 di Indonesia, sehingga pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, pada sumber daya moral, Public Engagement and Action Unit Greenpeace Indonesia melakukan mobilisasi dengan cara melibatkan musisi Barasudara melalui festival musik Pestapora. Hal tersebut memiliki alasan strategis bahwa target pasar festival Pestapora dan pendengar Barasudara merupakan kalangan anak muda yaitu Generasi Z dan Milenial. Lebih dari itu, Generasi Z dan Milenial juga memiliki tingkat kepedulian yang lebih tinggi terhadap kondisi lingkungan daripada generasi lainnya di Indonesia. Sehingga cara agregasi

dengan menyampaikan pesan saat bernyanyi mampu mendapatkan perhatian publik lalu individu yang mendukung pesan Global Climate Strike 2023 dapat dikonversi secara kolektif.

Kedua, pada sumber daya kultural, Public Engagement and Action Unit Greenpeace Indonesia melakukan mobilisasi dengan cara mengorganisir konsolidasi sebelum aksi Global Climate Strike 2023 berlangsung. Konsolidasi nasional perwakilan komunitas dari Sulawesi, Papua, Kalimantan, Sumatera, dan lain lain dilakukan secara daring melalui channel komunikasi yang sudah terhubung dan menghasilkan pembahasan mengenai panduan aksi, tuntutan aksi, dan konsep aksi berdasarkan keresahan yang dialami pada masing-masing daerah. Konsolidasi ini termasuk dalam akses sumber daya produksi diri yang mampu menambah nilai pada sumber daya yang sudah dikumpulkan.

Ketiga, pada sumber daya organisasi sosial, Public Engagement and Action Unit menggunakan Koalisi Jeda Iklim dalam mengelola Global Climate Strike 2023. Koalisi Jeda Iklim berisikan organisasi, komunitas, dan kaum akademis yang memiliki fokus dalam perlindungan lingkungan hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Enter Nusantara, Paralegal Jalanan, Bumi Butuh Aksi, dan lain lain. Koalisi ini termasuk dalam koalisi strategis di mana kegiatan terbangun dari koalisi yang ada. Peran dan tanggung jawab anggota koalisi melengkapi dalam aksi sesuai dengan kapasitas yang ada. Akses penggunaan sumber daya tersebut merupakan produksi diri artinya anggota koalisi selain Greenpeace Indonesia mampu membawa sumber daya baru melalui jaringan dari masing-masing organisasi yang di mana tidak terjaring oleh Greenpeace Indonesia.

Keempat, pada sumber daya manusia, Public Engagement and Action Unit Greenpeace Indonesia menjamin keahlian tenaga kerja Journey sesuai dengan prinsip dan nilai dalam aksi Global Climate Strike 2023. Nilai *Justice, Equality, Diversity, dan Inclusion (JEDI)* menjadi nilai aksi Global Climate Strike 2023. Melalui nilai dan Journey tersebut, tenaga kerja Greenpeace Indonesia dalam aksi mampu memahami tingkat kesadaran isu yang maksimal dan meminimalisir tingkat kesadaran unaware. Keahlian yang diterapkan tersebut mampu menjadi nilai lebih dan menjadi akses sumber daya produksi diri.

Kelima, pada sumber daya material, Public Engagement and Action Unit Greenpeace Indonesia melakukan mobilisasi dengan cara mengalokasikan hasil *fundraising* untuk operasionalisasi aksi Global Climate Strike 2023. Alokasi dana tersebut dipastikan oleh Greenpeace Indonesia sebelum aksi berlangsung dan rincian biaya dirancang berdasarkan skala prioritas kampanye dan kondisi di lapangan selama aksi berlangsung. Tindakan

transparansi diterapkan oleh Greenpeace Indonesia untuk melindungi asumsi Greenpeace Indonesia tidak independen dalam berkampanye, sehingga hal ini mampu dikategorikan sebagai akses sumber daya perlindungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apresian, S. R. (2021). *Gerakan Aksi Iklim Indonesia Meningkat tapi Belum Pengaruhi Kebijakan*. Diakses dari <https://theconversation.com/gerakan-aksi-iklim-indonesia-meningkat-tapi-belum-pengaruh-kebijakan-157970> pada 31 Maret 2023.
- Arfiana, A. (2018). *Gerakan Mahasiswa Pemuda Tastura (Tatas Tuhu Trasna) dalam Pelaksanaan Program Pupuk Bersubsidi di Lombok Tengah*. Doctoral Dissertation. Universitas Brawijaya.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Climate Resilience Development Policy 2020-2045*. Jakarta.
- Bernstein, L., Bosch, P., Canziani, O., Chen, Z., Christ, R., & Riahi, K. (2008). *IPCC, 2007: Climate Change 2007: Synthesis Report*. Geneva, Switzerland.
- Copsey, T.; Dalimunthe, S.; Hoijtink, L.; Stoll, N. (2013). *Indonesia: How the people of Indonesia live with climate change and what communication can do*. BBC Media Action, London, UK.
- Creswell, John W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Della Porta, D., & Diani, M. (2006). *Social Movements: An Introduction*. Blackwell Publishing: Oxford.
- Diani, Mario and Donati, Paolo R. (1999). Organizational Change in Western European Environmental Groups: A Framework for Analysis. *Environmental Politics*, 8, 13–34.
- Eko, Rosiana. (2022). *Climate Change: New evidence on how media can engage youth to take action*. Diakses dari www.bbc.co.uk/mediaaction/documents/indonesia-climate-change-media-research-2022.pdf pada 31 Maret 2023.
- Greenpeace. (2021). *Satu Tahun Undang-Undang Cipta Kerja, Greenpeace Beri Tanda Peringatan*. Diakses dari <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/45376/satu-tahun-undang-undang-cipta-kerja-greenpeace-beri-tanda-peringatan/> pada 31 Maret 2023.

- Kamaliah, A. (2022). *Orang Indonesia Juara Dunia Paling Tidak Percaya Global Warming*, diakses dari <https://inet.detik.com/science/d-6228282/orang-indonesia-juara-dunia-paling-tidak-percaya-global-warming> pada 1 April 2023.
- Murdiyanto, Eko. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Nadia, N. (2019). *Mobilisasi Sumber daya dalam Aksi Kamisan*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta.
- Ruhiat, F., & Heryadi, D. (2019). Strategi NGO lingkungan dalam menangani polusi udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia). *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 8(1), 16-30.
- Setiono, Heri dan Putra, Fadilah. (2006). *Gerakan sosial: Konsep, strategi, aktor, hambatan dan tantangan gerakan sosial di Indonesia*. Malang: Program Penguatan Simpul Demokrasi
- Setiyawan, K. B. (2018). *Strategi Mobilisasi Sumber daya Gerakan Sekolah Menulis Buku Sebagai Gerakan Sosial Baru (Studi Kasus Pada Organisasi Gerakan Menulis Buku Indonesia)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Sukmana, Oman. (2016). *Konsep dan teori gerakan sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Suwarno, J. (2016). Gerakan Muncar Rumahku dan Strategi mobilisasi sumber daya pada gerakan sosial penyelamatan lingkungan. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3 (2).
- Walhi. (2023). *Global Climate Strike 2023, Anak Muda Indonesia Tegaskan Krisis Iklim Harus Jadi Prioritas Agenda Kampanye Pemilu 2024*. Diakses dari <https://www.walhi.or.id/global-climate-strike-2023-anak-muda-indonesia-tegaskan-krisis-iklim-harus-jadi-prioritas-agenda-kampanye-pemilu-2024>, pada 31 Maret 2023.